



Pergantian Direksi Jakpro Dianggap Cuci Gudang

► Ketua Komisi B DPRD Sebut Pj Gubernur Berhak

Gambir, Warta Kota

Pergantian lima direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dianggap sebagai langkah cuci gudang Pemerintah DKI Jakarta.

Sebagai perwakilan pemegang saham pemerintah daerah, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berhak mengganti direksi tersebut.

"Saya sih mengistilahkan lebih ringan ini cuci gudang, tapi secara person to person (per orang) tidak menutup mata terhadap prestasi yang mereka sudah buat," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail pada Rabu (30/11/2022).

Ismail menyakini, Heru Budi Hartono telah melalui berbagai pertimbangan dalam proses rekrutmen mereka. Salah satu indikator yang diperhatikan adalah prestasi mereka selama berada di korporasi sebelumnya.

"Tidak asal direkrut, mereka dipertimbangkan aspek prestasinya dan profesional kerjanya, dan terbukti mereka bisa menyelesaikan penugasan-penugasan yang luar biasa berat ya," ujar Ismail.

Menurut dia, pergantian direksi di perseroan merupakan hal yang wajar, terutama ketika ada pergantian pimpinan di level Kepala Daerah.

Kata dia, Kepala Daerah yang baru tentunya akan mengevaluasi kinerja direksi di BUMD DKI Jakarta, sehingga jika dianggap perlu penyegaran maka pemerintah daerah akan melakukannya.

"Di awali waktu itu (Dirut) MRT Jakarta, kemudian diikuti Komisaris LRT Jakarta terus yang ini sekarang Jakpro. Entah BUMD manalagi, saya pikir itu menjadi hak prerogatifnya Pj Gubernur dan harusnya memang objektif ya," jelasnya.

Politisi PKS ini menilai, sejauh ini direksi Jakpro memang diisi oleh orang profesional atau yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.

Jika selama ini kinerjanya belum terlalu maksimal, dia menduga karena chemistry atau keterkaitan antardireksi belum terbentuk dengan baik.

Sebagai perwakilan pemegang saham pemerintah daerah, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berhak mengganti direksi tersebut.

"Kemudian di anak-anak perusahaannya juga ya karena setahu saya di beberapa bulan lalu Dirut (sebelumnya) Pak Widi saat itu sudah menyampaikan kepada kami di rapat bahwa sedang melakukan pembenahan terhadap anak-anak perusahaannya," ucapnya.

"Nanti akan dibuat lebih produktif dan lebih bersinergi, sehingga proyek penugasan contohnya yang diberikan kepada Jakpro itu diharapkan nanti bisa dikerjakan, di internal dengan anak-anak perusahaannya, ya bisa saling menghidupi tidak menjadi beban seperti itu," lanjutnya.

Diketahui, Pemerintah DKI Jakarta mengganti posisi lima jabatan direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Salah satu di antaranya bukan diberhentikan, tetapi ditunjuk menjadi Direktur Utama perseroan tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, pergantian anggota direksi itu diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) sirkuler (keputusan para pemegang saham di luar RUPS).

"Tuan Iwan Takwin sebagai Direktur Utama Perseroan, Tuan I Gede Adi Adnyana T sebagai Direktur Perseroan, Tuan Adrian Rusmana sebagai Direktur Perseroan, Tuan Solihin sebagai Direktur Perseroan dan Tuan Adi Santosa sebagai Direktur Perseroan," jelas Fitria. (faf)